

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan sebagai suatu entitas ekonomi didirikan dengan maksud untuk melaksanakan serangkaian aktifitas-aktifitas dan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi, dimana diharapkan dapat memperoleh suatu hasil akhir yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan tersebut. Hasil akhir aktifitas-aktifitas dan kegiatan perusahaan itu tergambar dalam seperangkat laporan yang disusun oleh pihak manajemen itu sendiri. Dalam membuat laporan ini biasanya perusahaan menggunakan data-data keuangan, sehingga laporan ini disebut dengan laporan keuangan. Saat ini banyak ditemui perusahaan yang didirikan dengan melakukan serangkaian aktifitas guna pencapaian laba atau keuntungan perusahaan, dimana untuk melakukan olah data tersebut ilmu akuntansi memiliki peranan yang sangat penting, baik itu perusahaan berskala kecil maupun perusahaan berskala besar. Sehingga dengan adanya ilmu akuntansi, penyajian laporan perusahaan dapat menyediakan informasi yang baik, dan dapat pula dipergunakan untuk pihak-pihak yang memerlukannya baik itu pihak intern maupun ekstern.

Luas atau tidaknya cakupan akuntansi, tergantung pada besar atau kecilnya usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, akuntansi tidak hanya diterapkan pada perusahaan besar tetapi juga pada UMKM. Pelaksanaan akuntansi pada UMKM sangat tergantung pada tingkat pengetahuan pengelola perusahaan terhadap akuntansi. Karena hal ini akan berdampak pada proses akuntansi yang digunakan dalam menghasilkan laporan keuangan. Modal utama pembangunan perekonomian Indonesia bergantung pada keberadaan UMKM yang handal dan kuat. Kedudukannya sebagai pemain utama dan tulang punggung dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, yaitu: penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan

pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Itu telah terbukti ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997–1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. (Bank Indonesia, 2015).

Dalam analisis makro ekonomi, UMKM memiliki peran strategis dalam pendapatan nasional dan pengurangan pengangguran sesuai dengan UU No. 20 tahun 2008 bab III pasal V yang berbunyi “meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan”. Kemampuan UMKM dalam menopang perekonomian Indonesia sudah terbukti sejak krisis ekonomi tahun 1997-1998. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi tersebar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman pada saat krisis serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis (Singgih, 2007:218). Saputro, dkk. (2010:140-145) melihat bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 55.56% berdasarkan data Biro Perencanaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2008. Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2016 menyatakan bahwa UMKM di Indonesia mencapai 56,6 juta. Dari jumlah tersebut, 99,8% UMKM mampu menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Dengan kata lain, UMKM adalah tulang punggung perekonomian negara (Tuti dan Dwijayanti, 2014:158).

Keberhasilan UMKM dalam menghadapi masa krisis tidak serta merta menjadikan mereka mampu menjaga kelangsungan usahanya dengan baik. Banyak hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus dihadapi para pelaku UMKM, seperti aspek keuangan, sumber daya manusia (SDM), iklim usaha, infrastruktur dan pemasaran sehingga walaupun memiliki peran yang strategis bagi ekonomi namun upaya mengembangkan sektor UMKM juga bukanlah hal yang mudah (Bank Indonesia, 2015).

Umumnya, UMKM tidak memiliki catatan (laporan) keuangan sehingga keuntungan dalam usaha sering kali tidak diperhitungkan. Jika usaha sedang

untung, keuntungan tersebut sering kali habis digunakan untuk keperluan selain kegiatan operasional, bahkan tidak jarang pendapatan yang diperoleh semuanya dianggap sebagai keuntungan, padahal di antara keuntungan yang dimaksud terdapat modal yang terpakai untuk konsumsi. Jika ini terjadi, kegiatan perusahaan akan terganggu dan tidak jarang, volume kegiatan usaha akhirnya berkurang atau menurun yang nantinya dapat berdampak pada terhentinya kegiatan perusahaan (Sri Handini, dkk 2019: 31-35).

Permasalahan internal UMKM terjadi karena rendahnya profesionalisme sumber daya manusia yang mengelola, keterbatasan permodalan dan akses terhadap perbankan maupun pasar, dan kemampuan penguasaan teknologi yang rendah. Sedangkan permasalahan eksternal adalah iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil, kebijakan pemerintah yang belum memihak bagi pengembangan usaha kecil, kurangnya pembinaan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Hafsah, 200:1). Banyak UMKM yang tidak menyediakan atau menyusun laporan keuangan dalam usahanya (Tuti dan Dwijayanti, 2014:158). Selain itu, Rendahnya penyusunan laporan keuangan disebabkan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. (Pradipta, 2015: 859-860).

Pada perkembangan UMKM dalam melaporkan laporannya, kini telah dikeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Pelaksanaan standar akuntansi ini diharapkan dapat memberi gambaran kinerja manajemen UMKM di masa lalu dan prospek di masa depan sehingga dapat dipercaya dan diandalkan baik oleh pengurus maupun oleh anggota UMKM dan pihak eksternal yang memiliki kepentingan lain yang berhubungan dengan UMKM (Pradipta, 2015: 860). Penerapan SAK ETAP ini tentu tidak hanya perlu dipersiapkan oleh pengusaha UMKM namun juga oleh pemerintah, pihak penyalur kredit dan lembaga akuntansi secara bersama-sama. Mereka juga harus berperan untuk mensosialisasikan standar yang baru kepada pengusaha UMKM, memberikan pelatihan dasar akuntansi dan penyajian laporan

keuangan berdasarkan SAK ETAP bagi pelaku UMKM dan membuat program pendukung lainnya.

Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, menunjukkan kenaikan secara terus menerus terhadap perkembangan unit usaha dari UMKM di Indonesia. Data perkembangan tersebut dapat kita lihat di dalam Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perkembangan UMKM seluruh Indonesia pada tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah UMKM Indonesia
2015	59.262.772
2016	61.651.177
2017	62.922.617
2018	64.194.057
2019	65.465.497

Sumber: Website Badan Pusat Statistik diakses pada tahun 2021

Berdasarkan data pra penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Kecamatan Bengkalis belum menerapkan SAK ETAP dalam sistem pencatatan dan pembukuan mereka. Hal ini sangat disayangkan mengingat perkembangan industri di Kecamatan Bengkalis dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang didominasi oleh usaha kecil dan menengah dibandingkan dengan usaha besar. Melihat kondisi ini, apabila UMKM dikelola dan dikembangkan dengan baik tentunya akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh dalam menggerakkan perekonomian Provinsi Riau.

Data populasi UMKM di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

1.2 Populasi UMKM di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah UMKM 2021
1	Bengkalis	1.158
2	Bantan	603
3	Siak Kecil	124
4	Bukit Batu	260
5	Bandar Laksamana	157
6	Pinggir	967
7	Talang Muandau	95
8	Mandau	8.707
9	Bathin Solapan	2.714
10	Rupat	491
11	Rupat Utara	133
JUMLAH UMKM		15.409

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Data Olahan, 2021

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) pada UMKM dengan mengambil judul “**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Wilayah Kecamatan Bengkalis**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sosialisasi dan informasi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM di Kecamatan Bengkalis?
2. Apakah ukuran usaha berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM di Kecamatan Bengkalis?
3. Apakah lama usaha berdiri berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM di Kecamatan Bengkalis?
4. Apakah omzet berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM di Kecamatan Bengkalis?
5. Apakah sosialisasi dan informasi, ukuran usaha, lama usaha dan omzet secara simultan berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM di Kecamatan Bengkalis?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah membatasi penelitian dan fokus pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hanya pada Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah sosialisasi dan informasi SAK ETAP berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM di Kecamatan Bengkalis;
2. Untuk mengetahui apakah ukuran usaha berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM di Kecamatan Bengkalis;
3. Untuk mengetahui apakah lama usaha berdiri berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM di Kecamatan Bengkalis;
4. Untuk mengetahui apakah omzet berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM di Kecamatan Bengkalis
5. Untuk mengetahui apakah sosialisasi dan informasi, ukuran usaha, lama usaha dan omzet secara simultan berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM di Kecamatan Bengkalis

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan informasi yang berguna kepada peneliti dalam implementasi Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada usaha UMKM di Kecamatan Bengkalis.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait implementasi Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

c. Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengusaha UMKM yang sudah maupun belum melakukan pembukuan serta laporan keuangan secara optimal.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini rnenguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam rnelakukan pembahasan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN